

ANALYSIS OF GOVERNMENT PERFORMOMANCE (Case Study of Local Government Rejang Lebong)

¹Meriana

¹Politeknik Raflesia - *merianaandi@gmail.com*

Abstract - This study aims to determine the financial performance of Rejang Lebong Regency Government. The analysis used in this research is Financial Ratio with Qualitative, using 5 (five) Ratio that is, Degree of Fiscal Decentralization Degrees Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Ratio of Harmony. Uses from the Rejang Lebong Revenue Budget Report from 2014 to 2016. The results of this study can be concluded that the Financial Performance of Rejang Lebong Regency is the comparison of financial performance from 2014 to 2016 which is still less satisfactory, since the original income of Rejang Lebong Regency is still relatively low compared to the Self Transfer Local Income. In terms of revenue the original district rejang lebong still very less because it is still dependent on the Transfer from the center. From effectiveness is also still less effective, from efefiensi still less efficient because the average is still equal to 97,34%. In terms of harmony also operational spending is still greater than the capital spending Rejang Lebong Regency.

Keywords - Financial Performance Analysis (Degrees of Fiscal Decentralization, Degrees of Independence Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Ratio of Harmony)

1) LATAR BELAKANG

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kinerja. Dari setiap satuan kerja telah memiliki manajer untuk mengelola keuangan. Kinerja dari manajer tersebut dapat mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di masing-masing satuan kerja.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah tersebut yang sesuai dengan perundang-undangan. Penggunaan dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud

dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian?
3. Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kesenjangan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah pada Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

1. Kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal;
2. Kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian;
3. Kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah;
4. Kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah;
5. Kinerja keuangan pada Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kesenjangan;

2) KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung bejalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan undang-undang (Ibnu Syamsi, 1986: 199).

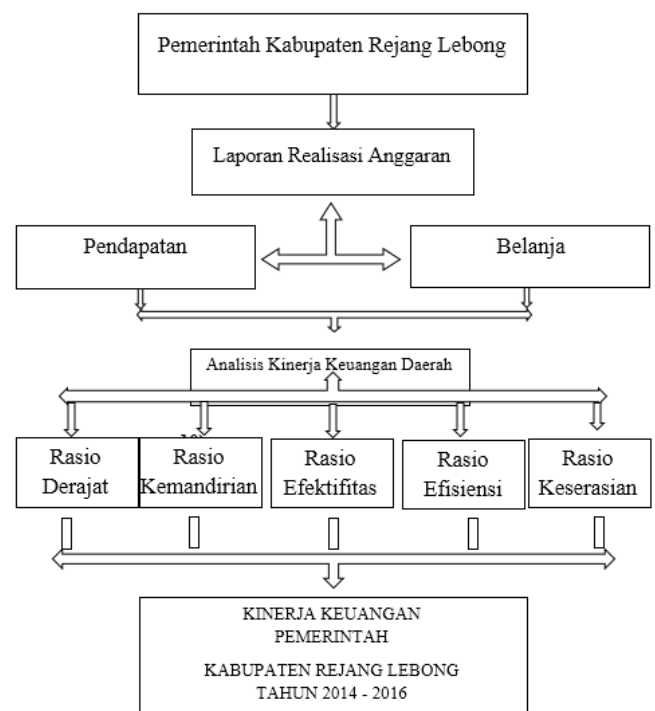
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010).

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator Proses (*Process*) adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
- 3) Indikator Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
- 6) Indikator Dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kerangka Pikir



Sumber: Penulis (2017)

3) METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan melihat permasalahan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang mana dana bantuan dari Pemerintah lebih banyak dari pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari Kabupaten Rejang Lebong itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) dalam mengelola keuangan Kabupaten Rejang Lebong, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kesenjangan. Berikut Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OKPD) Kabupaten Rejang Lebong

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama 3 (tiga) Tahun, dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

4) HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Keuangan Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2017. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang didapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rejang Lebong. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong. Adapun hasil dari Analisis Rasio Tersebut adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 4.1.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Thn	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DDF (%)	Kemampuan
2014	64.936.983.995	801.154.075.127	8,10	Sangat Kurang

2015	58.706.435.941	868.517.855.952	6,75	Sangat Kurang
2016	74.340.825.324	991.224.556.033	7,50	Sangat Kurang

Sumber Data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan data diatas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai dari Tahun 2014 Rasio Derajat Desentralisasi pada Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar 8,10% pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6,75%, dan pada Tahun berikutnya 2016 terjadi kenaikan menjadi 7,50% meskipun mengalami kenaikan pada tahun terakhir namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan Kabupaten Rejang Lebong masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.2.
Rasio Kemandirian

Thn	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2014	64.936.983.995	611.892.330.400	10,61	Instruktif
2015	58.706.435.941	665.203.694.156	8,82	Instruktif
2016	74.340.825.324	743.059.291.113	10,00	Instruktif

Sumber Data : DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan Tabel di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada Tahun 2015 dimana nilai persentasenya sebesar 8,82% dan nilai tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 10,61% sedangkan pada Tahun 2016 hanya sebesar 10,00% lebih tinggi dari pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern terutama dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi.

3. Rasio Efektivitas

Tabel 4.3.
Rasio Efektivitas

Thn	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2014	50.217.203.425	64.936.983.995	129,31	Sangat Efektif
2015	66.187.723.381	58.706.435.941	88,70	Kurang Efektif
2016	75.271.697.319	74.340.825.324	98,80	Cukup Efektif

Sumber Data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2015 Kurang Efektif karena nilai efektif hanya diantara 75%-89% yaitu 88,75% dan Tahun 2016 Cukup Efektif, karena nilai yang diperoleh

diantara 90%-99% yaitu 98,80%.. Dan untuk Tahun 2014 Sangat Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 129,31%.

4. Rasio Efisiensi

Tabel 4.4.
Rasio Efisiensi

Thn	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2014	760.653.379.293	801.158.075.127	95,04	Tidak Efisien
2015	851.591.747.483	868.517.855.952	98,05	Tidak Efisien
2016	981.736.029.685	991.224.556.033	99,04	Tidak Efisien

Sumber Data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan Tabel di atas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun dari 2014, 2015 sampai 2016 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sebesar 95,04%, 98,05% dan 99,04%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja daerah.

5. Rasio Keserasian

Tabel 4.5.
Rasio Efektivitas Belanja Operasi

Thn	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	760.653.379.293	565.795.718.350	74,40
2015	851.591.747.483	610.444.270.930	71,70
2016	981.736.029.685	663.877.345.389	67,62

Sumber data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten Rejang Lebong 71,24%. Dimulai dari Tahun 2014 di mana rasionya sebesar 74,40% menurun pada Tahun 2015 menjadi 71,70% dan terus mengalami penurunan menjadi 67,62% pada Tahun 2016.

Tabel 4.6.
Rasio Efektivitas Belanja Modal

Thn	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	760.653.379.293	169.586.051.890	22,30
2015	851.591.747.483	184.027.818.119	21,61
2016	981.736.029.685	202.529.475.010	20,63

Sumber data: DPKAD Kabupaten Rejang Lebong (Data Diolah 2017)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 21,51%. Dimulai pada Tahun 2014 dimana rasionya sebesar 22,30% mengalami penurunan pada Tahun 2015 menjadi 21,61%. Tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 20,63%.

5) KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 rasionya masing-masing sebesar: 8,10%, 6,75%, dan 7,50%.
- 2) Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 rasionya masing-masing sebesar: 10,61%, 8,82%, dan 10,00%.
- 3) Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah diketahui bahwa Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun 2015 berjalan tidak efektif karena efektivitasnya diantara 75%-89% yaitu 88,70%, sedangkan pada Tahun 2016 berjalan cukup efektif karena efektivitas masih di antara 90%-99% yaitu 98,80%. Untuk Tahun 2014 sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 129,31%.
- 4) Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebesar 97,38% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Berturut-turut dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 rasionya masing-masing sebesar: 95,04%, 98,05%, dan 99,04%.
- 5) Kinerja Keuangan Kabupaten Rejang Lebong jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 67,62%-74,40% rata-rata sebesar 71,24%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 20,63%-22,30%, rata-rata sebesar 21,51% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

6) SARAN

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan

pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan Asli Daerah, misalnya pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

[11] *bengkuluekspress.com Organisasi Kerja Pemerintah Daerah 2017*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adu Halim. (2007). **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Selemba Empat.
- [2] Abdul Halim. (2012). **Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [3] Afrida N. 2013. **Pengaruh Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)**, *Artikel Ilmiah*, Universitas Negeri Padang, tahun 2013.
- [4] Aries Djaenuri. (2012). **Hubungan Keuangan Pusat Daerah**. Bogor : Ghalia Indonesia.
- [5] Hendro Sumarjo. (2010) "**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**"
- [6] Ibnu Syamsi. (1986). **Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional**. Jakarta: CV Rajawali.
- [7] Mahmudi. (2010). **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- [8] Nurhidayat. (2005). **Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 & Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004**. Bandung : Nuansa Aulia.
- [9] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006